WALIKOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 di Kota Kotamobagu ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan /OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02 /2/2011 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Pupuk;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Menteri Nomor 07/Permentan/ SR.140 /10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan pembenah Tanah;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kets/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.

5. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014 ;
14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan dan Penetapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas :

a. merumuskan dan mempersiapkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ;
b. melaksanakan pembahasan kebijakan umum anggaran bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD ;
c. merumuskan dan mempersiapkan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk kemudian dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRD ;
d. menyiapkan rancangan Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) ;
e. menyusun dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabarannya ;
f. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
g. menelaah dan membahas program dan kegiatan baru yang tercantum dalam (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD dalam rangka perubahan APBD ;
h. merumuskan dan menyusun rancangan kebijakan umum perubahan APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan, menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBD ;
i. mempersiapkan rancangan Surat Edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang mengacu kepada Perubahan APBD ;
j. melakukan verifikasi terhadap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dan antar rincian obyek belanja ;
k. mempersiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang tata cara pergeseran anggaran ;
l. mempersiapkan naskah rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
m. pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan proses mempersiapkan, merumuskan dan menyusun anggaran daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2014 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	SEKRETARIS DPKAD	
2.	KEPALA DPKAD	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
5.	SEKRETARIS DAERAH KOTA	
6.	WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 26 FEBRUARI 2014

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Ir. TATONG BARA

Tembusan Yth. :

1. Wakil Walikota kotamobagu
2. Kepala Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu ;
3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Kota Kotamobagu;
4. Yang bersangkutan
5. A r s i p;

lampiran I : Keputusan Walikota Kotaobagu

Nomor : 35 Tahun 2014

Tanggal : 26 PEBRUARI 2014

Tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014

Kedudukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu
Tahun Anggaran 2014

No	Kedudukan Pejabat	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Wakil Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	Wakil Ketua	
4.	Asisten *Ekonomi* dan Pembangunan	Wakil Ketua	
5.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
6.	Kepala Bappeda	Wakil Sekretaris	
7.	Kepala Inspektorat	Wakil Sekretaris	
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
9.	Kepala Bagian Pembangunan	Anggota	
10.	Sekretaris DPKAD	Anggota	
11.	Sekretaris Bappeda	Anggota	
12.	Kabid Anggaran dan Perbendaharaan DPKAD	Anggota	
13.	Kabid Pendapatan DPKAD	Anggota	
14.	Kabid Akuntansi dan Pelaporan DPKAD	Anggota	
15.	Kabid Pengelolaan Aset DPKAD	Anggota	

1	2	3	4
16.	Kepala Seksi Anggaran DPKAD	Anggota	
17.	Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pembukuan DPKAD	Anggota	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Ir. TATONG BARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
2. Pupuk An-Organik adalah pupuk proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV;
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Desa/Kecamatan) yang dibeli oleh petani/ kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
7. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah biaya pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang;

9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu;
10. Pekebun adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu;
11. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu;
12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
13. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi pupuk An-organik dan pupuk Organik di dalam Negeri;
14. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
15. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Kotamobagu;
19. Direktur Jendral adalah Eselon I di lingkungan Kementrian Pertanian Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan Perundang-undangan;
20. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di kota Kotamobagu.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan / atau udang paling luas 1 (satu) hektar;
(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kecamatan serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2014;
(2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan;
(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Camat, Lurah, Koordinator BP3K Kecamatan dan PPL setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan;
(2) Rincian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana ayat (1) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

(1) Kebutuhan pupuk bersubsidi pada pasal 4, memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Camat, Lurah, Koordinator BP3K Kecamatan dan PPL setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.

Pasal 6

(1) Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu wajib melaksanakan pembinaan pada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya;
(2) Rincian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah;
(2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota Kotamobagu ditetapkan Walikota;
(3) Untuk memenuhi Kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan lebih dahulu sebelum penetapan dari Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu;
(4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi I (satu) tahun;

BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV di petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
   a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawab;
   b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing Kecamatan;
   c. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.

(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV atau ke petani atau kelompok tani sebagaimana di maksud pada ayat (2), Pemerintah Kecamatan melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5;

(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh;

(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kota Kotamobagu.

Pasal 10

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;

(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 11

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
- Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
- Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
- Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
- Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea = 50 kg;
- Pupuk SP-36 = 50 kg;
- Pupuk ZA = 50 kg;
- Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
- Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

Pasal 12

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus, yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Yang Berlaku.

Pasal 14

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Kotamobagu wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya;
(2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 15

(1) KPPP di Kota Kotamobagu wajib menyampaikan *laporan pemantauan dan pengawasan pupuk* bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota;
(2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam *Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala* Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal *ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1* Januari 2014, agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 30 Januari 2014

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Ir. TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal : 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. MUSTAFA LIMBALO

Lampiran I : Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : 5 Tahun 2014
Tanggal : 30 Januari 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN KOTA KOTAMOBAGU

(Ton)

NO	KECAMATAN	JENIS- JENIS PUPUK (An-Organik)				PUPUK ORGANIK
		UREA	SP-36	NPK	ZA	
1	KOTAMOBAGU UTARA	155	13	40	14	7
2	KOTAMOBAGU TIMUR	356	32	130	33	13
3	KOTAMOBAGU SELATAN	613	51	210	54	26
4	KOTAMOBAGU BARAT	76	4	20	5	4
	J U M L A H	**1200**	**100**	**400**	**106**	**50**

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Ir. TATONG BARA

Lampiran II : Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : 5 Tahun 2014
Tanggal : 30 Januari 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN PERBULAN KOTA KOTAMOBAGU

(Ton)

NO	SUB SEKTOR	JENIS- JENIS PUPUK (An-Organik)				PUPUK ORGANIK
		UREA	SP-36	NPK	ZA	
1	TANAMAN PANGAN	907	61	294	87	48
2	HORTIKULTURA	100	13	28	2	0
3	PETERNAKAN	24	19	16	1	1
4	PERKEBUNAN	147	7	60	16	1
5	BUDIDAYA PERIKANAN	22	0	2	0	0
	J U M L A H	**1200**	**100**	**400**	**106**	**50**

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Ir. TATONG BARA

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014
SUB SEKTOR (TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, DAN BUDIDAYA PERIKANAN)
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN SE KOTA KOTAMOBAGU

Jenis Pupuk : Urea

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	14	6	7	8	24	13	10	12	4	18	14	25	155
2	KOTAMOBAGU TIMUR	44	21	20	29	37	34	18	20	18	29	30	56	356
3	KOTAMOBAGU SELATAN	76	48	34	59	59	48	25	38	23	74	73	56	613
4	KOTAMOBAGU BARAT	6	3	2	4	11	8	7	7	2	8	6	12	76
	Jumlah	**140**	**78**	**63**	**100**	**131**	**103**	**60**	**77**	**47**	**129**	**123**	**149**	**1200**

Jenis Pupuk : Urea

NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	TANAMAN PANGAN	112	67	41	61	97	87	48	65	35	111	79	104	907
2	HORTIKULTURA	5	2	3	12	11	7	6	5	5	11	19	14	100
3	PETERNAKAN	3	1	0	0	6	0	1	4	2	0	3	4	24
4	PERKEBUNAN	18	6	16	25	15	8	4	2	4	6	20	23	147
5	BUDIDAYA PERIKANAN	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	2	4	22
	Jumlah	**140**	**78**	**63**	**100**	**131**	**103**	**60**	**77**	**47**	**129**	**123**	**149**	**1200**

Sambung . . . . .

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN
JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	11	10	5	8	15	12	5	8	4	19	13	14	124
2	KOTAMOBAGU TIMUR	36	22	10	20	31	25	17	20	11	23	21	21	257
3	KOTAMOBAGU SELATAN	56	33	24	31	41	46	23	33	19	59	41	59	465
4	KOTAMOBAGU BARAT	9	2	2	2	10	4	3	4	1	10	4	10	61
	Jumlah	112	67	41	61	97	87	48	65	35	111	79	104	**907**

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	1	0.5	0.5	2	1	1	1	1	1	1	2	2	14
2	KOTAMOBAGU TIMUR	1.5	0.5	1	4	3	2	2	2	2	2	6	4	30
3	KOTAMOBAGU SELATAN	2	0.5	1	5.5	6.5	3.5	2.5	1.5	1.5	7.5	10.5	7.5	50
4	KOTAMOBAGU BARAT	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6
	Jumlah	**5**	**2**	**3**	**12**	**11**	**7**	**6**	**5**	**5**	**11**	**19**	**14**	**100**

Sambung .....

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0	0.5	1	3
2	KOTAMOBAGU TIMUR	1	0.5	0	0	2	0	0.5	1.5	1	0	1	0.5	8
3	KOTAMOBAGU SELATAN	1	0.5	0	0	3.5	0	0.5	1.5	1	0	1.5	2.5	12
4	KOTAMOBAGU BARAT	0.5	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	1
	Jumlah	**3**	**1**	**0**	**0**	**6**	**0**	**1**	**4**	**2**	**0**	**3**	**4**	**24**

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	1	1	1	1	1	1	1	0.5	1	1	1	0.5	11
2	KOTAMOBAGU TIMUR	6	2	4	7	4	3	1	0.5	1	2	9	13.5	53
3	KOTAMOBAGU SELATAN	10.5	2	10.5	16	9.5	3.5	1.5	0.5	1.5	2.5	9.5	8.5	76
4	KOTAMOBAGU BARAT	0.5	1	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	7
	Jumlah	**18**	**6**	**16**	**25**	**15**	**8**	**4**	**2**	**4**	**6**	**20**	**23**	**147**

Sambung .....

SUB SEKTOR : BUDIDAYA PERIKANAN
JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	1	3
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1.5	8
3	KOTAMOBAGU SELATAN	1	1	2	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	10
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0.5	1
	Jumlah	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**4**	**22**

Sambung . . . . . .

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014
SUB SEKTOR (TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN BUDIDAYA)
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN SE KOTA KOTAMOBAGU

Jenis Pupuk : SP36

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
2	KOTAMOBAGU TIMUR	4	3	2	3	2	2	2	1	3	4	2	4	32
3	KOTAMOBAGU SELATAN	5	7	2	4.5	4	2.5	2	2	3.5	5	6	7.5	51
4	KOTAMOBAGU BARAT	1	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0.5	1	0	0.5	4
	Jumlah	**12**	**11**	**5**	**9**	**7**	**6**	**5**	**4**	**8**	**11**	**9**	**13**	**100**

Jenis Pupuk : SP36

NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	TANAMAN PANGAN	7	7	3	5	4	2	3	2	5	7	6	10	61
2	HORTIKULTURA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
3	PETERNAKAN	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	19
4	PERKEBUNAN	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	7
5	PERIKANAN BUDIDAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**12**	**11**	**5**	**9**	**7**	**6**	**5**	**4**	**8**	**11**	**9**	**13**	**100**

Sambung .....

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN
JENIS PUPUK : SP36

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	0.5	8
2	KOTAMOBAGU TIMUR	2.5	2	0.5	2	1.5	0.5	1.5	0.5	1.5	2.5	2	4	21
3	KOTAMOBAGU SELATAN	3	4	2	2	2	1	1	1	2	4	3	5	30
4	KOTAMOBAGU BARAT	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0.5	2
	Jumlah	7	7	3	5	4	2	3	2	5	7	6	10	61

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
JENIS PUPUK : SP36

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0.5	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0.5	2
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0.5	0	0.5	0	0	0.5	0	0.5	1	0.5	0.5	0	4
3	KOTAMOBAGU SELATAN	1	1	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	6.5
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0.5
	Jumlah	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**13**

Sambung .....

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : SP36

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0.5	1	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0.5	1	0	0	1	0.5	0	0	0.5	0	0.5	1	5
3	KOTAMOBAGU SELATAN	1	0	1	1	1	1.5	1	1	0.5	1.5	0.5	1	11
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0	0	1
	Jumlah	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**19**

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
JENIS PUPUK : SP36

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	1
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	2
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0.5	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0	0	1	0.5	0	3.5
4	KOTAMOBAGU BARAT	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
	Jumlah	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**7**

Sambung .....

SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA
JENIS PUPUK : SP36

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sambung . . . . . .

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014
SUB SEKTOR (TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN BUDIDAYA)
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN SE KOTA KOTAMOBAGU

Jenis Pupuk : NPK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	4	4	5	2	4	4	4	1	2	2	4	4	40
2	KOTAMOBAGU TIMUR	13	11	15	9	11	11	12	8	9	9	11	11	130
3	KOTAMOBAGU SELATAN	22	15	36	10	17	14	21	7	15	15	19	19	210
4	KOTAMOBAGU BARAT	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	20
	Jumlah	**41**	**32**	**58**	**22**	**34**	**31**	**39**	**17**	**27**	**27**	**36**	**36**	**400**

Jenis Pupuk : NPK

NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	TANAMAN PANGAN	30.5	24	47.5	14	26	23	28.5	9	19	19	25.5	28	294
2	HORTIKULTURA	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	28
3	PETERNAKAN	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	16
4	PERKEBUNAN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
5	PERIKANAN BUDIDAYA	0.5	0	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0	2
	Jumlah	**41**	**32**	**58**	**22**	**34**	**31**	**39**	**17**	**27**	**27**	**36**	**36**	**400**

Sambung .....

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN
JENIS PUPUK : NPK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	2	2	2	22
2	KOTAMOBAGU TIMUR	12	8	14	3	7	6	10	4	5	5	11	11	96
3	KOTAMOBAGU SELATAN	15.5	14	30.5	9	16	15	15.5	3	11.5	11.5	11.5	14	167
4	KOTAMOBAGU BARAT	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	1	9
	Jumlah	**30.5**	**24**	**47.5**	**14**	**26**	**23**	**28.5**	**9**	**19**	**19**	**25.5**	**28**	**294**

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
JENIS PUPUK : NPK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0	4
2	KOTAMOBAGU TIMUR	1	0.5	1	1	0.5	1	1	0.5	1	0.5	1	1	10
3	KOTAMOBAGU SELATAN	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5	1.5	1	1	12
4	KOTAMOBAGU BARAT	0.5	0	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0	2
	Jumlah	**3**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**28**

Sambung .....

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : NPK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0.5	0	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0	2
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	5
3	KOTAMOBAGU SELATAN	1	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	8
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**16**

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
JENIS PUPUK : NPK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	KOTAMOBAGU TIMUR	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	18
3	KOTAMOBAGU SELATAN	1.5	2	2	2	2	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	22
4	KOTAMOBAGU BARAT	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	8
	Jumlah	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**60**

Sambung .....

SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA
JENIS PUPUK : NPK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	1
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	1
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**0.5**	**0**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**0.5**	**0**	**2**

Sambung . . . . . .

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014
SUB SEKTOR (TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN BUDIDAYA)
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN SE KOTA KOTAMOBAGU

Jenis Pupuk : ZA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	14
2	KOTAMOBAGU TIMUR	7	5	4	5	4	3	1	0.5	1	1	0.5	1	33
3	KOTAMOBAGU SELATAN	13.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	54
4	KOTAMOBAGU BARAT	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5	5
	Jumlah	**23**	**12**	**11**	**12**	**14**	**12**	**4**	**3**	**4**	**4**	**3**	**4**	**106**

Jenis Pupuk : ZA

NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	TANAMAN PANGAN	19	11	10	11	11	11	2	2	3	3	1	3	87
2	HORTIKULTURA	0.5	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0.5	0	2
3	PETERNAKAN	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	1
4	PERKEBUNAN	3	1	1	1	2	1	1.5	1	1	1	1.5	1	16
5	PERIKANAN BUDIDAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**23**	**12**	**11**	**12**	**14**	**12**	**4**	**3**	**4**	**4**	**3**	**4**	**106**

Sambung .....

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN
JENIS PUPUK : ZA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	3	1.5	1	1.5	1	1	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5	11
2	KOTAMOBAGU TIMUR	6	3	3	3	3	3.5	1	1	1	1	0	1	26.5
3	KOTAMOBAGU SELATAN	9	6	5.5	6	6.5	6	0.5	1	1.5	1.5	1	1	45.5
4	KOTAMOBAGU BARAT	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0.5	4
	Jumlah	**19**	**11**	**10**	**11**	**11**	**11**	**2**	**2**	**3**	**3**	**1**	**3**	**87**

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
JENIS PUPUK : ZA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	1
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0	1
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**0.5**	**0**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**0.5**	**0**	**2**

Sambung .....

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : ZA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0.5
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
JENIS PUPUK : ZA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	3
2	KOTAMOBAGU TIMUR	1	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0	0.5	5
3	KOTAMOBAGU SELATAN	1.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	7
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0	1
	Jumlah	**3**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1.5**	**1**	**1**	**1**	**1.5**	**1**	**16**

Sambung .....

SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA
JENIS PUPUK : ZA

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sambung . . . . . .

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014
SUB SEKTOR (TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN BUDIDAYA)
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN SE KOTA KOTAMOBAGU

Jenis Pupuk : ORGANIK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	7
2	KOTAMOBAGU TIMUR	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5	2	0.5	2	13
3	KOTAMOBAGU SELATAN	2	1.5	2	0.5	1	2.5	2	2.5	2	2	2	6	26
4	KOTAMOBAGU BARAT	1	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0	0.5	0	1	4
	Jumlah	**5**	**3**	**4**	**2**	**3**	**4**	**4**	**4**	**3**	**5**	**3**	**10**	**50**

Jenis Pupuk : ORGANIK

NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	TANAMAN PANGAN	4.5	3	4	2	3	3.5	4	4	3	4.5	3	9.5	48
2	HORTIKULTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PETERNAKAN	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	1
4	PERKEBUNAN	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	1
5	PERIKANAN BUDIDAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**5**	**3**	**4**	**2**	**3**	**4**	**4**	**4**	**3**	**5**	**3**	**10**	**50**

Sambung .....

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN
JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	7
2	KOTAMOBAGU TIMUR	1	1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1.5	12
3	KOTAMOBAGU SELATAN	2.5	1.5	2	1	1.5	1.5	2.5	2	1.5	2.5	1.5	5	25
4	KOTAMOBAGU BARAT	0.5	0	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	1.5	4
	Jumlah	**4.5**	**3**	**4**	**2**	**3**	**3.5**	**4**	**4**	**3**	**4.5**	**3**	**9.5**	**48**

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sambung .....

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0.5
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.5**	**1**

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0.5
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**0.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.5**	**0**	**0**	**1**

Sambung .....

SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA
JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (TON)												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	KOTAMOBAGU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KOTAMOBAGU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KOTAMOBAGU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KOTAMOBAGU BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Ir. TATONG BARA